

Studi Keruangan Tingkat Kesejahteraan Rumah Tangga Penghuni Ex-Bantaran Rel Kereta Api di Kecamatan Majalaya

Septi Sri Rahmawati, Sri Rum Giyarsih, Sudrajat

Masuk: 31 08 2022 / Diterima: 17 11 2022 / Dipublikasi: 01 12 2022

Abstract *The reactivation of railway lines in Indonesia is being promoted. The reactivation of this train is one of the efforts to improve public transportation services. Currently, the reactivation of the railway line in Majalaya District, which is part of the Bandung-Ciwidey segment, is entering the land inventory stage. In the future, this reactivation will impact the people who live in these locations. They choose to live in this location because of the low level of welfare. Therefore, it is interesting to examine the welfare of this community, so it becomes the input for the stakeholders. This study aims to analyze the welfare of the ex-railroad community in Majalaya District, Bandung Regency, West Java Province, Indonesia. This study uses a survey method with a quantitative approach. The sampling technique uses proportional random sampling with a total sample of 111 households. The study uses primary data from structured interviews with instrument guidance. The analysis technique used is descriptive analysis with a spatial approach. The study results showed that the community was in the category of moderate welfare. The heads of households are: having productive age, graduated from elementary school, have an average dependent number of 4.4 people, are natives of Majalaya District, work in the industrial sector, have sufficient access to education, have high security, have moderate ICT access, having adequate transportation, having adequate health services, having sufficient health facilities, having permanent housing, and classified as poor with a poverty depth of 13.4%. Spatially, the ex-railway settlement area in Sukamaju Village, which is located close to the center of government and the center of economic activity, has a higher level of welfare than other villages. Meanwhile, Padamulya Village has the lowest welfare percentage. Determination of welfare is essential to implement a decent life for all levels of society in the sustainable development agenda.*

Keywords: *Spatial Study; Welfare; Socio-Economic; Urban Ex-Railroad Line Community; Majalaya District*

Abstrak Reaktivasi jalur kereta api di Indonesia sedang digalakkan. Reaktivasi kereta api ini merupakan salah satu upaya peningkatan pelayanan transportasi publik. Saat ini, reaktivasi jalur kereta api di Kecamatan Majalaya yang termasuk segmen Bandung-Ciwidey sedang memasuki tahap inventarisasi lahan. Reaktivasi ini ke depan akan memberikan dampak bagi masyarakat yang bermukim di lokasi tersebut. Masyarakat yang memilih tinggal di lokasi ini pada umumnya beralasan karena tingkat kesejahteraan yang masih rendah. Oleh karena itu, menarik untuk mengkaji kesejahteraan masyarakat ini sehingga menjadi masukan bagi pemangku kepentingan. Tujuan dari penelitian adalah menganalisis kesejahteraan masyarakat ex-bantaran rel kereta api di Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Digunakan metode survei dengan pendekatan kuantitatif pada penelitian ini. Teknik pengambilan sampel menggunakan *proportional random sampling* dengan jumlah sampel 111 kepala rumah tangga. Penelitian ini menggunakan data primer dari wawancara terstruktur dengan panduan kuesioner. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan pendekatan keruangan. Hasil penelitian menunjukkan secara umum masyarakat termasuk kategori kesejahteraan sedang. Kepala rumah tangga umumnya usia produktif, tamatan sekolah dasar, jumlah tanggungan rata-rata 4,4 jiwa, warga asli Kecamatan Majalaya, bekerja pada sektor industri, akses pendidikan cukup, keamanan tinggi, akses TIK sedang, transportasi cukup, pelayanan kesehatan cukup,

fasilitas kesehatan cukup, perumahan permanen, dan tergolong miskin dengan kedalaman kemiskinan sebesar 13,4%. Secara keruangan, kawasan permukiman ex-bantaran rel di Desa Sukamaju yang berlokasi dekat dengan pusat pemerintahan dan pusat kegiatan ekonomi memiliki tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi dibandingkan desa lainnya. Sementara itu, Desa Padamulya memiliki persentase kesejahteraan paling rendah. Penentuan kesejahteraan sangat penting dalam upaya mewujudkan hidup layak bagi seluruh lapisan masyarakat dalam agenda pembangunan berkelanjutan.

Kata kunci: Studi Keruangan; Kesejahteraan; Sosial-Ekonomi; Masyarakat Ex-Bantaran Rel; Kecamatan Majalaya

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.

Copyright © 2022 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.



1. Pendahuluan

Penyediaan perumahan layak menjadi permasalahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (Average, 2019). Permasalahan tersebut terjadi di perkotaan negara-negara berkembang dan terus mengalami peningkatan yang tinggi (Satterthwaite, 2016; Amini, 2016; Ezeh *et al.*, 2017). Hal tersebut menggambarkan tata aturan dan tata kelola perkotaan yang kurang baik (Chiodelli & Moroni, 2014). Permasalahan semakin kompleks karena sepertiga penduduk di perkotaan memilih tinggal di tempat tidak layak huni tersebut (Patel *et al.*, 2014) dan saat ini untuk pertama kalinya penduduk perkotaan memiliki proporsi lebih besar daripada penduduk yang tinggal di pedesaan (Mahabir *et al.*, 2016).

Masyarakat berpenghasilan rendah menghuni permukiman kumuh dengan kualitas perumahan buruk dan fasilitas terbatas (Tanni *et al.*, 2014). Kondisi di lingkungan ini memiliki akses

air terbatas, saluran air dipenuhi sampah, dan tidak manusiawi (Das *et al.*, 2017). Umumnya perumahan kumuh ilegal (Supriatna & van der Molen, 2014) dan menjadi masalah pembangunan perkotaan (Patel, 2012). Pendapatan rendah mendorong masyarakat tetap tinggal demi pemenuhan kebutuhan perumahan (Vasudevan, 2015). Diperlukan pembangunan efektif dan inklusif untuk menangani masalah ini (Abubakar *et al.*, 2019). Pembangunan inklusif penting untuk melindungi masyarakat miskin di wilayah tersebut (Rachmawati *et al.*, 2017).

Penempatan lahan yang tidak sesuai dengan tata ruang wilayah serta tidak layak huni merupakan salah satu masalah di perkotaan. Masalah tersebut mendorong semakin menjamurnya permukiman informal, ilegal dan kumuh salah satunya di sepanjang bantaran rel kereta api (Bhakti, 2018). Diperlukan tinjauan kesejahteraan masyarakat untuk pengentasan permukiman kumuh sekaligus meningkatkan kesejahteraan penghuninya (Sunarti *et al.*, 2019). Gambaran sosial ekonomi dapat memberikan cara paling sesuai untuk menjelaskan fenomena permukiman kumuh dan memberikan kerangka kerja

¹Septi Sri Rahmawati, ²Sri Rum Giyarsih, ³Sudrajat,

¹Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta, Indonesia

²Universitas Gadjah Mada, Indonesia

srirum@ugm.ac.id

baik secara teknis, non teknis, dan pragmatis (Mukeyu, 2018). Perbaikan di wilayah ini memberikan perbaikan lingkungan bagi kaum miskin kota (Corburn & Sverdik, 2017).

Salah satu permukiman yang terletak di Wilayah Pusat (WP) industri di Indonesia adalah kawasan permukiman ex-bantaran rel kereta api di Kecamatan Majalaya (Rahmawati S.S. *et al*, 2020). Wilayah bantaran rel kereta api merupakan wilayah yang ilegal untuk dihuni (Undang-undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian). Menurut Nassar & Elsayed (2018) permukiman akan terus berkembang dan berubah menjadi permukiman kumuh sejalan dengan pertumbuhan penduduk. Oleh karena itu, kawasan ini sangat berpotensi mengalami perubahan yang dapat mengakibatkan degradasi lingkungan dan penurunan kesejahteraan masyarakat. Pernyataan tersebut didukung oleh Holmes & Argent (2016) bahwa wilayah pembangunan akan mengalami perubahan yang yaitu perubahan lahan menjadi permukiman.

Berdasarkan analisis data BPS Kabupaten Bandung (2013-2018) pertumbuhan penduduk di Kecamatan Majalaya mengalami peningkatan signifikan yaitu sebesar 10%. Menurut Han *et al*. (2017) perubahan penduduk mendorong perubahan penggunaan lahan menjadi permukiman di kawasan ilegal termasuk permukiman di sekitar bantaran rel kereta api. Permukiman tersebut menjadi kawasan permukiman informal dengan karakteristik kumuh, liar, dan menentang hukum. Pada lingkup yang lebih luas, Patino & Duque (2013) menggambarkan permukiman kumuh dengan kegiatan ekonomi terbatas, kehidupan yang sulit, perumahan yang tidak layak, tidak aman, dan tidak higienis. Pada akhirnya

masyarakat di kawasan permukiman seperti ini akan menjadi miskin dan termarginalkan.

Menurut Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) (2019) Kecamatan Majalaya memiliki 18 kawasan permukiman kumuh. Permukiman tersebut tersebar di beberapa desa. Desa Padaulun dan Majasetra merupakan kawasan permukiman yang dinyatakan paling kumuh. Jumlah orang miskin di dua lokasi tersebut mencapai hampir 30% dari jumlah penduduknya. Hal tersebut membuktikan bahwa pada umumnya lingkungan kurang layak huni memiliki angka kemiskinan penduduk yang tinggi.

Wilayah permukiman kumuh perlu ditata sesuai dengan mandat Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28H Ayat 1. Upaya peningkatan kawasan layak huni perlu dipertimbangkan dengan matang dan terencana agar memberikan beberapa pilihan terbaik dalam menangani kawasan permukiman kumuh di perkotaan maupun perdesaan. Untuk menangani permasalahan tersebut, harus dipertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakatnya. Penanganan permukiman kumuh menjadi permukiman layak huni sangat dipengaruhi oleh kesejahteraan masyarakat yang dinilai dari kondisi sosial ekonominya. Pernyataan tersebut dikuatkan oleh penelitian Tian (2015). Oleh sebab itu, informasi mengenai karakteristik sosial ekonomi dan kesejahteraan masyarakat perlu dilaksanakan untuk mewujudkan kota tanpa kumuh dan dapat mewujudkan pembangunan masyarakat yang berkelanjutan. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka tujuan artikel ini adalah untuk menganalisis kesejahteraan masyarakat ex-bantaran

rel kereta api di Kecamatan Majalaya. Adapun manfaat yang diperoleh adalah adanya informasi pendukung mengenai sosial ekonomi dan kesejahteraan untuk penanganan kawasan permukiman khususnya di Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung.

Penelitian ini memiliki keterbaruan dalam analisis yaitu dengan memadukan kajian kesejahteraan masyarakat dengan analisis spasial. Berbeda dengan Mardiana *et al.* (2014); Siregar *et al.* (2017) dan Rizal *et al.* (2018), pada penelitian ini disajikan peta hasil distribusi spasial kesejahteraan rumah tangga. Selain itu, kajian ini mengaitkan lokasi permukiman dengan lokasi pusat-pusat kegiatan yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat.

2. Metode

Penelitian menggunakan metode survei dengan pendekatan kuantitatif. Pengumpulan data dilaksanakan dengan wawancara terstruktur dengan panduan instrument berupa kuisisioner dengan pertanyaan tertutup. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan pendekatan keruangan.

Pengambilan jumlah sampel didasarkan rumus Nomogram Harry King dengan pertimbangan bahwa rumus ini representatif (mewakili), sederhana dan untuk mendapatkan hasil yang pasti dari keseluruhan rumah tangga penghuni ex-bantaran rel kereta api di Kecamatan Majalaya. Mengacu pada nilai populasi berjumlah 443 rumah tangga, dapat diketahui bahwa sampel rumah tangga berjumlah 111 rumah tangga (36% dari jumlah populasi) dengan kepala keluarga yang menjadi rumah tangga penelitian.

Wawancara dilaksanakan kepada 111 kepala rumah tangga di

kawasan permukiman ex-bantaran rel kereta api di Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung.

Pada penilaian kesejahteraan terdapat variabel ekonomi dan sosial. Indikator-indikator sosial-ekonomi dibobot sesuai dengan parameter BPS dalam Susenas 2018 dengan modifikasi. Analisis kesejahteraan memadukan perhitungan kesejahteraan menggunakan Susenas 2011 yang telah dilaksanakan oleh Rizal *et al.* (2018), Siregar *et al.* (2018), dan Mardiana *et al.* (2014) yang menggunakan indikator-indikator dalam Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Perbedaannya adalah pada penelitian digunakan pedoman Susenas yang dilaksanakan oleh BPS tahun 2018 sebagai landasan penentuan kesejahteraan. Indikator Susenas 2018 yang telah mengalami perubahan terutama dalam penggunaan referensi waktu. Susenas 2018 merujuk pada perubahan informasi pada Susenas 2015 sebagai respon Indonesia dalam menghadapi SDGs (Johar *et al.*, 2019).

Penentuan tingkat kesejahteraan berdasarkan skor akhir dikelompokkan ke dalam tiga bagian sesuai rumus penentuan range skor Mardiana *et al.* (2014, 242) dengan modifikasi, antara lain:

$$RS = (ST - SR) / JK$$

Dimana:

RS = Range skor

ST = Skor tertinggi ($6 \times 3 = 18$)

SR = Skor terendah ($6 \times 1 = 6$)

JK = Jumlah klasifikasi yang digunakan

Hasil perhitungan dalam penelitian ini adalah range skor yang menggambarkan tingkat kesejahteraan rumah tangga, yaitu : Skor 27 – 35 (kesejahteraan tinggi); Skor 19 – 26

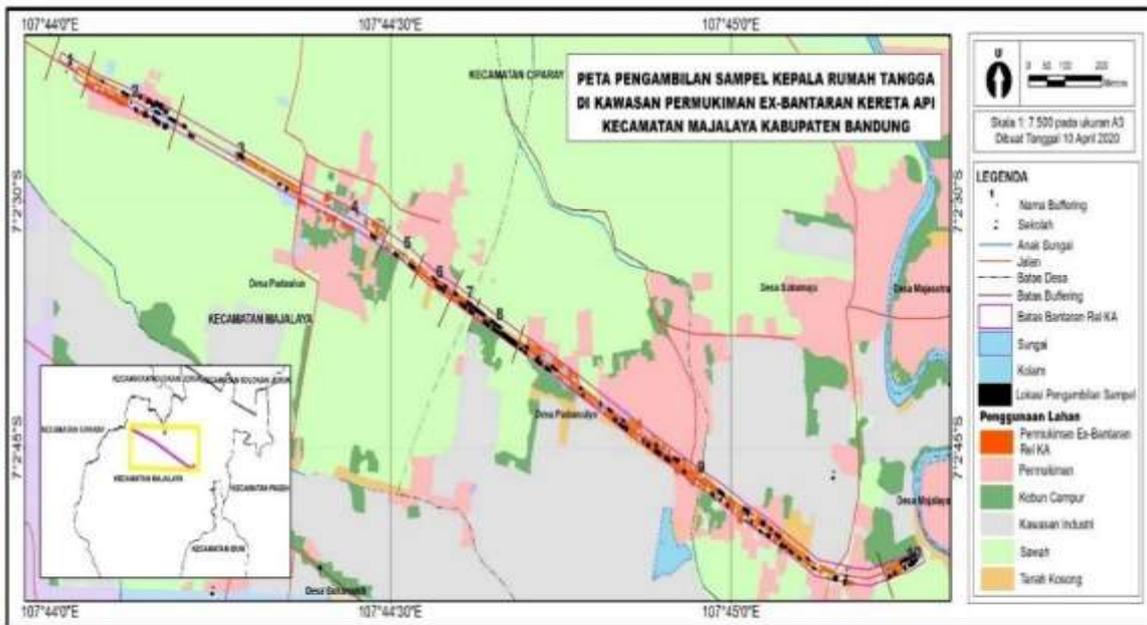
(kesejahteraan sedang); dan Skor 11 – 18 (kesejahteraan rendah).

Kecamatan Majalaya dipilih sebagai lokasi penelitian karena Kecamatan Majalaya merupakan salah satu kecamatan yang memiliki laju pertumbuhan penduduk tinggi di Kabupaten Bandung (Grafik 1) dan erat kaitannya dengan kebutuhan permukiman yang tinggi. Keberadaan lahan kosong ex-bantaran rel milik PT. KAI yang telah lama tidak beroperasi menjadi salah satu pilihan bermukim. Dalam waktu yang panjang, permukiman di ex-bantaran rel ini mengalami pertumbuhan hingga bantaran rel menghilang berganti dengan permukiman termasuk fasilitas-fasilitas pendukungnya. Kesejahteraan masyarakat yang rendah menjadi salah satu pendorong masyarakat menempati wilayah tersebut. Kesejahteraan rumah tangga memberikan gambaran

kemampuan pemukim dalam memilih lokasi hunian. Perhitungan skor kesejahteraan rumah tangga dapat dilihat pada Tabel 2. Sementara itu, peta pengambilan sampel di lokasi penelitian disajikan pada Gambar 1.



Gambar 1. Laju Pertumbuhan Penduduk di Kecamatan Majalaya
Sumber: BPS Kabupaten Bandung Tahun 2013-2022 diolah



Gambar 2. Peta Lokasi Pengambilan Sampel
Sumber: Interpretasi Citra Google Earth V 6.2.2.6613 (2019), BIG (2019), dan Survei Lapangan (2020)

Tabel 2. Indikator Kesejahteraan

Variabel	No	Indikator	Kriteria	Skor	Bobot
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Sosial	1.	Kondisi kepala rumah tangga a) Umur kepala keluarga: (3) usia produktif 15-65; (1) lansia 65+ b) Pendidikan kepala keluarga: (5) Perguruan tinggi; (4)SMA; (3)sederajat; (2) SMP; (1) SD; Tidak sekolah (0) c) Penghasilan: diatas UMR3); Di bawah UMR (1)	Keluarga sejahtera (8-11) Keluarga menengah (6-7) Keluarga pra-sejahtera (3-5)	3 2 1	4%
	2..	Pendidikan a) Biaya sekolah: terjangkau (3); cukup terjangkau (2); sulit terjangkau b) Jarak sekolah: 0 km (3); 0,01-3 km (2); >3 km (1) c) Prosedur penerimaan: mudah (3); cukup (2); Sulit (1)	Mudah (skor 8-9) Cukup (skor 6-7) Sulit (skor 3-5)	3 2 1	12%
	3.	Keamanan a) Pernah menjadi korban kejahatan dalam satu tahun terakhir: Ya (1);Tidak (3) b) Penanganan terhadap tindakan kriminal: ada (3);Tidak Ada (1) c) Ketersediaan pengamanan seperti pos ronda;pos jaga;polisi: ada(3);tidak ada(1)	Aman (8-9) Cukup aman (6-7) Tidak aman (3-5)	3 2 1	4%
	4.	Teknologi, Informasi dan Komunikasi a) Menggunakan telepon seluler: ya (3);tidak (1) b) Memiliki telepon kabel: ya (3);tidak (1) c) Menggunakan computer;PC;Laptop;Notebook: ya (3);tidak (1) d) Akses internet: ya (3);tidak (1)	Akses komunikasi tinggi(10-12) Akses komunikasi tinggi (7-9) Akses Komunikasi rendah (4-6)	3 2 1	4%
	5.	Transportasi a) Ongkos dan biaya: terjangkau (3); cukup terjangkau (2); Sulit terjangkau (1) b) Fasilitas kendaraan: tersedia (3); cukup tersedia (2); sulit tersedia (1) c) kepemilikan: sendiri (3); sewa (2); ongkos (1)	Mudah (8-9) Cukup (6-7) Sulit (3-5)	3 2 1	4%
	6.	Fasilitas Kesehatan a) Jarak RS terdekat: 0 km (3); 0,01-3 km (2);>3 km (1) b) Jarak ke Poliklinik: 0 km (3); 0,01-3 km (2);>2 km (1) c) Biaya berobat: Terjangkau (3); cukup (2); sulit terjangkau (1) d) Penanganan berobat: baik (3); cukup (2); jelek (1) e) Alat kontrasepsi: mudah didapat (3); cukup mudah (2); sulit (1) f) Konsultasi KB: mudah (3); cukup (2); sulit (1) g) Harga obat : terjangkau (3); cukup (2); sulit terjangkau (1)	Mudah (skor 17-23) Cukup (skor 12-16) Sulit (skor 7-11)	3 2 1	4%
	7.	Kesehatan anggota rumah tangga Banyaknya anggota keluarga yang sakit dalam satu bulan	Baik (<25% sakit) Cukup (25-50% sakit) Kurang (>50% sakit)	3 2 1	10%
	8.	Fasilitas Tempat Tinggal a) Pekarangan: luas > 100m2 (3); cukup 50-100m2 (2); sempit <50m2 (1) b) Hiburan: Video (4); TV (3); Tape recorder (2); radio (1) c) Pendingin: AC (4); lemari es (3); kipas angin (2); alami (1) d) Sumber penerangan listrik: listrik (3); petromak (2); lampu tempel 1 e) Bahan bakar: gas (3); minyak tanah (2); batu arang (1) f) Sumber air: PAM (6); Sumur bor (5); Sumur (4); mata air (3);air hujan (2); Sungai (1) g) MCK: KM sendiri (4); KM umum (3); sungai (2); kebun (1)	Lengkap (skor 21-27) Cukup (skor 14-20) Kurang (skor 7-13)	3 2 1	4%
	9.	Indikator Perumahan a) Atap: genting (5); asbes (4); seng (3); sirup (2); daun (1) b) Bilik: Tembok (5); setengah tembok (4); kayu (3); bambu kayu (2); bambu (1) c) Status milik: sendiri (3); sewa (2); tumpang (1) d) Lantai: porselen (5); ubin (4); plester (3); kayu (2); tanah (1) e) Luas: luas >100m2 (3); sedang 50-100m2 (2); sempit <50m2 (1)	Permanen (skor 15-21) Semi permanen (skor 10-14) Non permanen (skor 5-9)	3 2 1	13%
	10.	Kemiskinan berdasarkan kebutuhan barang pokok (Pendapatan Rumah Tangga)	Tidak miskin Hampir miskin Miskin Miskin sekali	4 3 2 1	25%
	11.	Kedalaman Kemiskinan (Pengeluaran dan Konsumsi Rumah Tangga)	Tidak miskin Hampir miskin Miskin Miskin sekali	4 3 2 1	16%

Sumber: Modifikasi Indikator Susenas BPS (2018), Rizal et al. (2018), Siregar et al. (2018), dan Mardiana et. al, (2014)

3. Hasil dan Pembahasan

Kondisi Sosial

1. Karakteristik Kepala Rumah Tangga

Mayoritas penduduk merupakan penduduk asli Kecamatan Majalaya yaitu sebanyak 91%. Sementara itu, 8% kepala rumah tangga merupakan pendatang yang baru bermukim kurang dari lima tahun (migran risen). Migran risen tersebut merupakan warga asli Provinsi Jawa Barat dari kabupaten lain yang memiliki corak mata pencaharian yang didominasi oleh sektor pertanian seperti Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Garut, dan Kabupaten Ciamis. Hal tersebut sejalan dengan Mantra (2015) yang menyatakan migran cenderung memilih tempat terdekat sebagai lokasi tujuan. Selain itu terdapat 1% penduduk dari Jawa Tengah. Hal tersebut memungkinkan terjadi karena

Kecamatan Majalaya merupakan pusat industri tekstil di Kabupaten Bandung merupakan penarik yang sangat kuat.

Pada umumnya pekerjaan kepala rumah tangga adalah buruh (42,3%) sesuai penelitian Tanni *et al.* (2014) yang menyebutkan masyarakat di permukiman kumuh pada umumnya merupakan pekerja kasar. Buruh di wilayah ini merupakan buruh harian lepas yang bekerja pada proyek bangunan, buruh angkut di pasar, buruh tani, serta buruh cuci. Selanjutnya, pekerjaan sebagai karyawan swasta sebesar 24,3%, wiraswasta (18%), petani (13,5%), dan pemulung (1%). Lokasi pekerjaan seluruhnya terletak di dekat hunian. Gambaran pekerjaan disajikan pada Gambar 2.



(a)

(b)

(c)

(d)

Gambar 3. Beberapa Jenis Pekerjaan: (a) Aneka pekerjaan di Pasar Majalaya; (b) Pekerjaan di sektor industri; (c) Pedagang; dan (d) Buruh pada proyek Citarum Bestari

Umur

Klasifikasi umur sesuai ketentuan BPS (2018) yaitu usia produktif (15-64 tahun) dan usia tidak produktif (>65 tahun). Mayoritas kepala rumah tangga merupakan usia produktif. Jumlah kepala rumah tangga yang merupakan usia produktif sebesar 84,7% dan sebesar 15,3% penduduk usia tidak produktif. Keberadaan usia tidak produktif yang masih bekerja pada umumnya memiliki karakteristik produktivitas kerja berkurang dan rentan mengalami gangguan kesehatan yang

mempengaruhi kondisi ekonomi rumah tangga (Apriliyanti, 2017).

Pendidikan

Pendidikan memiliki hubungan dengan produktivitas kerja terutama berkaitan dengan pendapatan yang diterima dan dibuktikan oleh Rochmawati *et.al.* (2018). Hasil penelitian menunjukkan 2/3 kepala rumah tangga lulusan sekolah dasar (SD) (66,7%). Lulusan terbanyak selanjutnya adalah lulusan sekolah menengah pertama (SMP) 19,8%,

disusul lulusan SMA sebesar 12,6%, tidak tamat SD satu rumah tangga, dan tidak terdapat lulusan perguruan tinggi. Hasil mengindikasikan pendidikan masih rendah. Pendidikan rendah umumnya memberikan pilihan lapangan pekerjaan yang terbatas dan pendapatan rendah. Pendapatan rendah mempengaruhi tingkat kesejahteraan rumah tangga. Tingkat pendidikan tersebut berada jauh dibawah rata-rata pendidikan Kabupaten Bandung sesuai BPS (2019). Rata-rata pendidikan yang ditamatkan di Kabupaten Bandung menunjukkan 47% penduduk merupakan lulusan SMA/ sederajat.

Jumlah Tanggungan dan Pendapatan Perkapita

Jumlah tanggungan mempengaruhi pengeluaran perkapita dalam rumah tangga sesuai dengan perhitungan Susenas (BPS, 2018). Semakin besar jumlah tanggungan kepala rumah tangga, maka pendapatan perkapita (yang diperoleh dari konsumsi rumah tangga) akan semakin kecil. Jumlah tanggungan terbesar adalah 10 anggota rumah tangga (ART) dan paling satu ART. ART terkecil (dengan satu anggota rumah tangga) merupakan kepala rumah tangga lanjut usia. Nilai

rata-rata jumlah tanggungan kepala rumah tangga sebesar 4,4 atau rasio 440 anggota rumah tangga, maksudnya setiap 100 orang kepala rumah tangga menanggung 440 anggota keluarga.

Setelah mengidentifikasi karakteristik kepala rumah tangga, maka karakteristik rumah tangga didominasi oleh keluarga sejahtera (70,3%) dan sisanya merupakan keluarga prasejahtera. Penilaian karakteristik rumah tangga dihitung berdasarkan usia kepala rumah tangga, pendidikan kepala rumah tangga, jumlah tanggungan kepala rumah tangga, dan pendapatan kepala rumah tangga. Data tersebut menunjukkan bahwa penghuni di lokasi penelitian cukup berdaya dalam menghidupi rumah tangga.

Akses Pendidikan

Rizal *et. al.* (2018) menyebutkan keberhasilan daerah diukur berdasarkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. Salah satu indikator penting dalam peningkatan SDM adalah pendidikan. Akses pendidikan diukur berdasarkan biaya sekolah, jarak ke sekolah, dan prosedur penerimaan untuk melanjutkan ke jenjang sekolah. Fasilitas pendidikan yang terdapat dapat dilihat pada Gambar 3.



Gambar 4. Beberapa Fasilitas Pendidikan Di Lokasi Penelitian

Akses pendidikan menunjukkan 59,5% rumah tangga cukup mudah

memasukkan anak ke jenjang pendidikan, 36,9% sulit, dan 3,6%

mudah memasukkan anak ke jenjang pendidikan. Kemudahan memasukkan anak ke jenjang pendidikan mempengaruhi usaha kepala rumah tangga dalam menyekolahkan anak ke jenjang yang lebih tinggi. Semakin mudah maka jenjang pendidikan semakin tinggi dan sebaliknya. Selain itu, kemudahan mempengaruhi ijazah tertinggi dan tahun sukses.

Keamanan

Tindakan kejahatan adalah segala tindakan baik disengaja maupun tidak, telah maupun percobaan yang dapat merugikan orang lain dalam hal badan, jiwa, harta benda, kehormatan dan lainnya yang diancam hukuman penjara dan kurungan (BPS, 2018). Pengalaman seseorang maupun sekelompok orang saat mengalami tindakan kejahatan, upaya penanganan dan preventif dalam menangani tindak kejahatan menjadi indikator tingkat keamanan di suatu wilayah. Tingkat keamanan menunjukkan 73% rumah tangga aman tinggal di wilayah tersebut dan sebesar 27% cukup aman. Sementara itu, tidak terdapat rumah tangga yang terkategori tidak aman. Data tersebut menunjukkan bahwa kawasan ini aman terlebih nilai rata-rata 3 mengindikasikan tindak kejahatan yang sedikit dan dapat dijadikan kawasan permukiman ditinjau dari keamanannya. Tingkat keamanan di permukiman yang dekat dengan lokasi industri tekstil umumnya memiliki cukup tinggi. Sejalan dengan penelitian Armela *et al.* (2015). Hal tersebut terjadi karena lapangan pekerjaan cukup menyerap tenaga kerja sehingga tingkat kriminalitas menjadi rendah.

Teknologi, Informasi, dan Komunikasi (TIK)

Memasuki revolusi 4.0, kemudahan akses TIK sangat penting. Siregar *et.al.* (2017) menyatakan TIK sangat berpengaruh positif dan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. Menurut BPS (2015), semakin banyak penduduk yang memiliki akses TIK dengan mengikuti kemajuan teknologi maka dipastikan kesejahteraannya meningkat. Kemudahan akses TIK tergolong rendah (52,3%), sedang (45%), dan tinggi (2,7%). Dapat disimpulkan bahwa tingkat kesejahteraan berdasarkan TIK masih rendah.

Transportasi

Kepemilikan fasilitas transportasi di dipengaruhi oleh lokasi bekerja dan pendapatan. Semakin jauh lokasi pekerjaan umumnya memiliki fasilitas transportasi. Transportasi berperan dalam mobilitas penduduk untuk menjangkau lokasi strategis lain seperti fasilitas kesehatan dan pendidikan. Akses transportasi berdasarkan ongkos dan biaya, fasilitas kendaraan, dan kepemilikan. Masyarakat memiliki akses transportasi beragam. Sebagian besar memiliki akses cukup (40,5%). Kemudahan transportasi sulit sebesar 37,8% dan 21,6% memiliki akses transportasi mudah. Data menunjukkan masyarakat memiliki keterbatasan transportasi.

Kemudahan Pelayanan Kesehatan

Kemudahan pelayanan kesehatan berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat. Indikator kemudahan pelayanan kesehatan diukur dari jarak rumah sakit terdekat, jarak ke

poliklinik/posyandu/puskesmas, biaya berobat, penanganan berobat, alat kontrasepsi, konsultasi KB, dan harga obat-obatan. Hasil penelitian menunjukkan 90,1% cukup mudah mendapatkan pelayanan kesehatan. Nilai yang tinggi tidak dapat dipisahkan dari program pemerintah yang memberikan BPJS Kesehatan bagi sebagian besar rumah tangga. Keberadaan puskesmas dan polindes di kawasan ini turut memberikan andil pelayanan kesehatan.

Kesehatan Rumah Tangga

Kriteria kesehatan rumah tangga mengacu pada kriteria BPS (2018) dengan menghitung banyaknya anggota rumah tangga yang mengalami sakit dalam satu bulan. Kesehatan akan mempengaruhi aktivitas sehari-hari anggotanya. Sebagian besar rumah tangga (80 rumah tangga) memiliki kesehatan yang baik, 21 rumah tangga memiliki kesehatan cukup, dan 10 rumah tangga kurang baik. Penyakit yang dialami diantaranya batuk, influenza, maag, gastritis, nyeri sendi, darah tinggi hingga tumor. Penyakit seperti batuk dan influenza pada

umumnya dialami oleh anak-anak sedangkan penyakit berat dialami orang dewasa. Nilai rata-rata dari kesehatan rumah tangga yaitu 3 memiliki arti tingkat kesehatan rumah tangga rata-rata baik.

Fasilitas Tempat Tinggal

Ukuran dari kenyamanan tempat tinggal salah satunya dari kecukupan fasilitas tempat tinggal. Penilaian penting dari fasilitas tempat tinggal meliputi luas pekarangan, fasilitas hiburan, fasilitas pendingin, sumber penerangan, bahan bakar, sumber air, dan fasilitas MCK (mandi, cuci, kakus). Fasilitas tempat tinggal umumnya sudah cukup lengkap (76,6%). Selain itu 26 rumah tangga memiliki fasilitas lengkap. Sumber penerangan yang digunakan 100% listrik meskipun 38 rumah tangga mengambil listrik dengan istilah *nyalur* yaitu memasang ke kabel PLN tanpa membayar. Fasilitas-fasilitas lain seperti *video player* dan kulkas telah dimiliki oleh sebagian penduduk yang terkategori memiliki fasilitas tempat tinggal yang lengkap. Fasilitas di lokasi penelitian dapat dilihat an Gambar 4.



(a) (b) (c) (d)
Gambar 5. Beberapa Fasilitas Perumahan di Lokasi Penelitian: (a) Dapur; (b) Elektronik; (c) Kamar Mandi; dan (d) Fasilitas Air Minum

Indikator perumahan

Indikator perumahan merupakan salah satu ukuran untuk menentukan tingkat kesejahteraan. Semakin baik

tempat tinggal menurut Siregar *et.al.* (2017) akan semakin sejahtera para penghuninya. Indikator perumahan terdiri dari penilaian dari atap, bilik,

status kepemilikan, lantai, dan luas tempat tinggal. Mayoritas rumah termasuk permanen (70,3%), disusul rumah semi permanen (28,8%), dan non permanen (0,9%). Rumah permanen menunjukkan sebagian besar rumah tangga memiliki kesejahteraan yang baik dilihat dari indikator perumahan. Indikator perumahan permanen memberikan masalah berkaitan dengan legalitas bangunan yang belum menemukan kesepakatan dengan PT. KAI (Kereta Api Indonesia). Faktor legalitas berpotensi menimbulkan konflik di masa depan. Menurut Tanni *et al.* (2014) kondisi demikian disebabkan karena masyarakat sebenarnya sadar bahwa perumahan bukan tempat tinggal permanen mereka.

Kondisi Ekonomi

Kemiskinan Rumah Tangga

Kemiskinan rumah tangga dihitung berdasarkan pengeluaran rumah yang dapat merepresentasikan pendapatan rumah tangga. Pengeluaran rumah tangga diukur berdasarkan Susenas (2018) yang mengukur total pengeluaran dengan menjumlahkan pengeluaran pangan dan non pangan. Informasi pengeluaran pangan meliputi pengeluaran dari padi-padian; umbi-umbian; ikan, udang, cumi dan kerang; daging; telur dan susu; sayur-sayuran; kacang-kacangan; buah-buahan; minyak dan kelapa; bahan minuman; bumbu-bumbuan; bahan makanan lainnya; makanan dan minuman jadi; serta rokok dan tembakau dalam satu minggu terakhir.

Jumlah pengeluaran pangan satu minggu mencapai Rp 568.564,00 dan dalam satu bulan Rp 2.436.704,00.

Sementara itu, pengeluaran pangan per kapita mencapai Rp 137.683,00 atau 590.070 dalam satu bulan. Pengeluaran tertinggi pada sayur-sayuran dan disusul oleh pengeluaran padi-padian, serta rokok dan tembakau. Pengeluaran terendah ditempati berturut-turut dari yang paling rendah yaitu: bahan minuman, umbi-umbian, serta ikan, udang, cumi, dan kerang. Data menunjukkan bahwa penduduk memenuhi kebutuhan utamanya dengan mengkonsumsi sayur-sayuran dengan ketergantungan yang sangat tinggi pada padi-padian. Selain itu, rumah tangga kurang meminati berbagai hewan laut. Hal tersebut terjadi karena lokasi jauh dari laut dan tambak ikan.

Pada pengeluaran non pangan, diperhitungkan pengeluaran fasilitas perumahan; aneka barang dan jasa; pakaian; barang tahan lama; berbagai pungutan; dan keperluan pesta. Jenis pengeluaran non pangan berdasarkan data pengeluaran bulanan dan tahunan. Total pengeluaran dalam satu bulan sebesar Rp 1.078.358,00 atau Rp 12.940.295,00 pertahun. Sementara itu, total pengeluaran perkapita dalam sebulan terakhir mencapai Rp 832.218 atau dalam satu tahun Rp 9.986.620. Pengeluaran tertinggi adalah perumahan dan fasilitas rumah tangga seperti bahan bakar, air dan listrik. Pengeluaran perkapita terendah ditempati oleh pakaian, alas kaki, dan tutup kepala.

Pengeluaran total menunjukkan pengeluaran pangan jauh lebih rendah dibandingkan dengan pengeluaran non pangan. Nilai konsumsi (pengeluaran pangan) per kapita dalam satu bulan kategori rendah yaitu Rp 590.070,00 jauh di bawah konsumsi pangan

perkapita di Kabupaten Bandung (BPS, 2019) yang mencapai rata-rata Rp 1.025.859,00. Pengeluaran total dicirikan dengan rata-rata pengeluaran perkapita perbulan sebesar Rp.1.422.298 terdiri dari pengeluaran pangan 41% pengeluaran pangan dan 59% pengeluaran non pangan.

Setelah diketahui jumlah pengeluaran, maka dapat diperoleh informasi kemiskinan di lokasi penelitian dengan perhitungan Susenas (2018) yang menghitung berdasarkan pengeluaran rumah tangga. Kemiskinan menggunakan kriteria Direktorat Tata Guna Tanah dalam Rizal (2018) dikategorikan sebagai berikut.

- 1) Miskin sekali, apabila tingkat pendapatan seseorang per kapita per tahun lebih rendah dari 75% dari total pengeluaran 9 bahan pokok.
- 2) Miskin, apabila tingkat pendapatan seseorang per kapita per tahun berkisar antara 75-125% dari total pengeluaran 9 bahan pokok.
- 3) Hampir miskin, apabila tingkat pendapatan seseorang per kapita per tahun berkisar antara 126-200% dari total pengeluaran 9 bahan pokok.
- 4) Tidak miskin, apabila tingkat pendapatan seseorang per kapita per tahun lebih besar 200% dari total pengeluaran 9 bahan pokok.

Berdasarkan hasil analisis diperoleh pendapatan perkapita pertahun rumah tangga terkategori miskin sekali yaitu sebesar 49,5%, miskin 31,5%, hampir miskin 11,7% dan tidak miskin 7,2%. Data tersebut menunjukkan bahwa menurut indikator ini masyarakat pada umumnya tergolong kategori menengah hingga menengah ke bawah.

Kedalaman Kemiskinan

Konsep garis kemiskinan lain yang digunakan dalam modifikasi kesejahteraan Susenas oleh Rizal *et.al.*, (2018) adalah garis kemiskinan Sajogyo. Kriteria ini mengukur kedalaman kemiskinan rumah tangga berdasarkan konsumsi karbohidrat (beras). Harga beras yang digunakan per Kg Rp.10.600,- sesuai PIHPS Nasional terkait harga beras pada 2020 pada saat penelitian di Provinsi Jawa Barat. Sementara itu kriteria dari indikator tersebut adalah sebagai berikut.

- 1) Tidak Miskin, apabila pendapatan per kapita per tahun seseorang lebih besar dari harga beras 480 kg (>5.088.000)
- 2) Miskin, apabila pendapatan per kapita per tahun seseorang dari harga beras 380-480 kg (4.028.000-5.088.000).
- 3) Miskin Sekali, apabila pendapatan per kapita per tahun seseorang lebih besar dari harga beras 240 kg (2.544.000-4.028.000).
- 4) Paling Miskin, apabila pendapatan per kapita per tahun seseorang lebih besar dari harga beras 240 kg (<2.544.000).

Berdasarkan analisis perhitungan diperoleh bahwa rumah tangga termasuk kategori tidak miskin sebesar 85,6%, miskin 8,1%, miskin sekali 4,5%, dan paling miskin 1,8%. Perbedaan kategori miskin antara perhitungan Direktorat Tata Guna Tanah dan Sajogyo disebabkan adanya perbedaan indikator. Kondisi tersebut menunjukkan sebanyak 14,4% masyarakat terancam kesulitan memenuhi kebutuhan pangannya.

Tingkat Kesejahteraan

Penilaian tingkat kesejahteraan diambil dari indikator yang terdapat pada Susenas (BPS, 2018) berdasarkan

hasil penilaian pada kondisi sosial dan ekonomi. Hasil perhitungan tingkat kesejahteraan dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Rekapitulasi Tingkat Kesejahteraan

No.	Variabel	Indikator	Nilai Rata-Rata			
			Jumlah	Skor	KRITERIA	
(1)	(2)	(3)			(4)	(5)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Sosial	Kondisi Sosial	5,1	1,00	0,04	1
2.		Pendidikan	5,5	2,00	0,24	1
3.		Keamanan	8,5	3,00	0,12	3
4.		TIK	6,5	2,00	0,08	3
5.		Transportasi	6,0	1,00	0,04	1
6.		Fasilitas Kesehatan	14,3	2,00	0,08	3
7.		Kesehatan	2,6	2,63	0,26	1
8.		Fasilitas Tempat Tinggal	19,5	2,00	0,08	3
9.		Indikator Perumahan	14,1	3,00	0,39	3
10.	Ekonomi	Pendapatan	2,0	2,00	0,50	1
11.		Konsumsi dan Pengeluaran	3,8	3,77	0,23	1
Nilai Rata-Rata			8,0	2	2,06	1,91

Sumber: Hasil Analisis (2020)

Rekapitulasi tingkat kesejahteraan tertinggi yaitu tingkat keamanan, indicator perumahan dan konsumsi rumah tangga. Sementara itu nilai terendah ditempati indikator kondisi sosial kepala rumah tangga. Hal tersebut menunjukkan bahwa kepala keluarga masih didominasi oleh kepala rumah tangga dengan penghasilan rendah,

pendidikan rendah dan tanggungan yang besar. Selain itu, transportasi masih belum menjadi prioritas masyarakat karena lapangan pekerjaan yang pada umumnya terletak dekat dengan rumah. Rekapitulasi jumlah rumah tangga berdasarkan kesejahteraan dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Tingkat Kesejahteraan Rumah Tangga

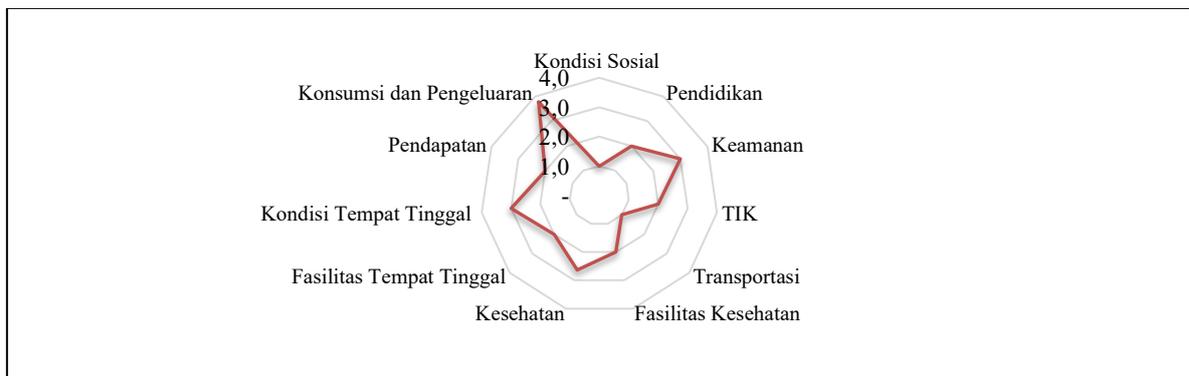
No.	Tingkat Kesejahteraan	Jumlah	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Kesejahteraan Tinggi	6	5,4
2.	Kesejahteraan Sedang	93	83,8
3.	Kesejahteraan Rendah	12	10,8
Total		111	100

Sumber: Hasil Analisis (2020)

Tabel 4 menunjukkan nilai rata-rata kesejahteraan tergolong sedang yaitu sebesar 83,8%. Kesejahteraan rendah menyusul dengan persentase 10,8% dan kesejahteraan tinggi sebesar 5,4%. Nilai ini menunjukkan para pemukim memilih lokasi tersebut karena secara umum memiliki kondisi kesejahteraan menengah hingga menengah bawah. Untuk melihat masing-masing perbandingan kriteria sosial-ekonomi pada indikator kesejahteraan disajikan pada Gambar 5. Gambaran kesejahteraan menunjukkan pengaruh tersebar yang mempengaruhi kesejahteraan. Pada gambar menunjukkan bahwa konsumsi dan pengeluaran rumah tangga baik dari

konsumsi pangan maupun non pangan menempati skor tertinggi. Sementara itu nilai terendah diduduki oleh kondisi sosial kepala rumah tangga. Untuk dapat melihat sebaran kondisi sosial ekonomi, dapat dilihat pada Gambar 6.

Pada umumnya masyarakat dengan kondisi sosial ekonomi rendah menempati lokasi di tengah ex-bantaran rel kereta api di Kecamatan Majalaya yaitu pada wilayah perbatasan Desa Padaulun dengan Desa Padamulya. Sementara itu, masyarakat menengah tersebar secara merata dari Desa Padaulun hingga Padamulya dan masyarakat dengan kondisi kesejahteraan tinggi tersebar tidak merata.



Gambar 5. Kondisi Sosial-Ekonomi Masing-Masing Indikator

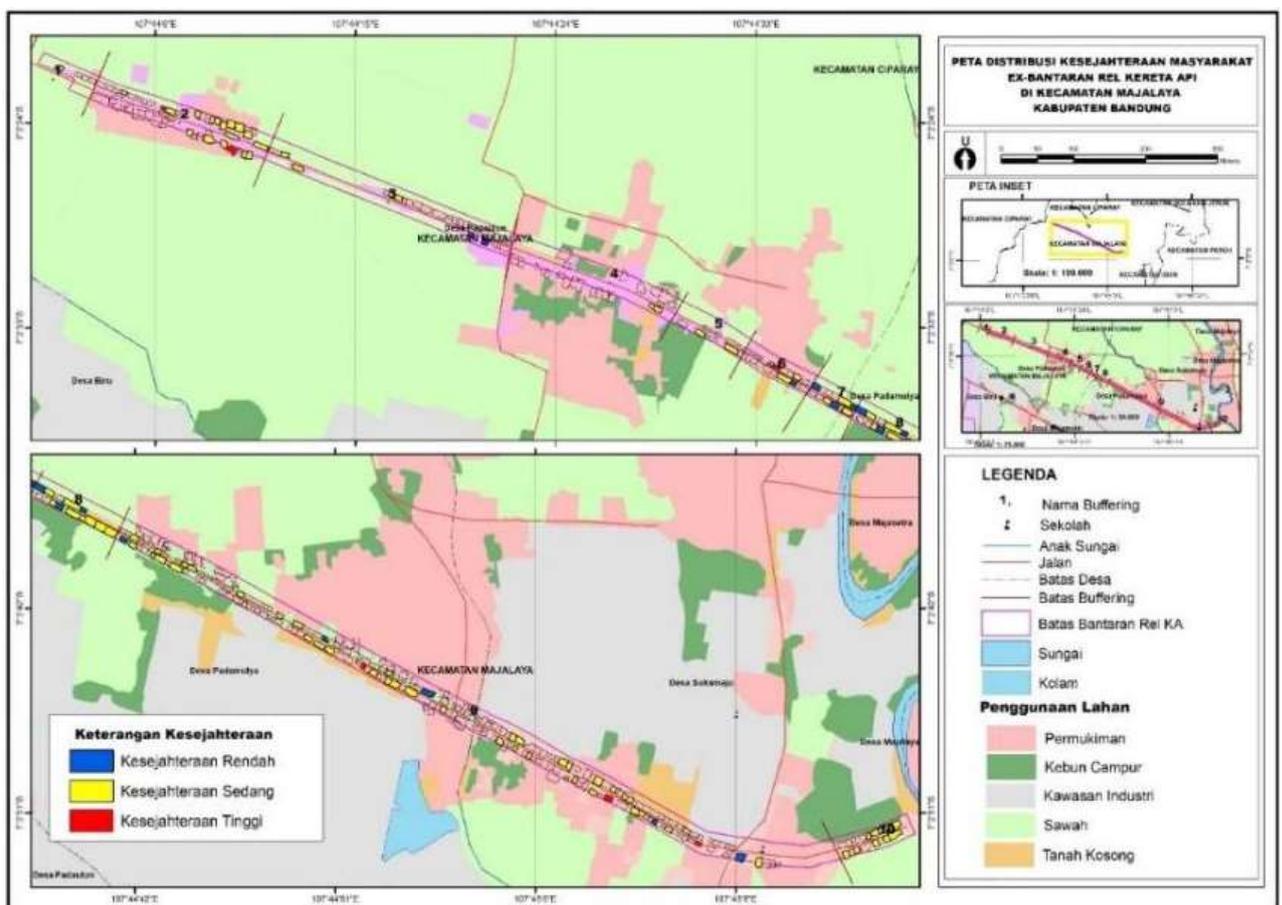
Hasil pada penelitian ini dibandingkan dengan penelitian Rizal *et al.* (2018) dan Siregar *et al.* (2017) menunjukkan hasil yang berbeda. Pada penelitian Rizal *et al.* (2018) hasil menunjukkan kesejahteraan tinggi mencapai 100%. Sementara itu, penelitian Siregar *et al.* (2017) data cenderung heterogen dicirikan didominasi oleh kesejahteraan sedang hingga menengah. Hal tersebut menunjukkan dengan teknis analisis

yang sama dapat menghasilkan hasil yang berbeda. Masyarakat ex-bantaran rel yang memiliki karakteristik kondisi sosial ekonomi yang sangat heterogen membuat tingkat kesejahteraan lebih bervariasi.

Gambar 6 menunjukkan sebaran keruangan tingkat kesejahteraan masyarakat ex-bantaran rel kereta api per desa di Kecamatan Majalaya. Gambar tersebut menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan pada masing-

masing desa menunjukkan kecenderungan yang serupa. Kesejahteraan masyarakat tergolong pada kesejahteraan sedang. Kawasan permukiman ex-bantaran rel di Desa Sukamaju memiliki tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi dibandingkan desa lainnya. Sementara itu, Desa Padamulya memiliki persentase paling tinggi pada persentase kesejahteraan rendah.

Kondisi tersebut dapat terjadi karena tingginya pendidikan dan lebih lengkapnya fasilitas mendorong kesejahteraan masyarakat. Kawasan permukiman ex-bantaran rel di Desa Sukamaju yang dekat dengan pusat ekonomi di Kecamatan Majalaya dan lebih lengkapnya fasilitas di wilayah tersebut mendorong perbedaan tingkat kesejahteraan.



Gambar 6. Distribusi Kesejahteraan Rumah Tangga
Sumber: Interpretasi Citra Google earth V 6.2.2.6613 (2019),
BIG (2019), Survei Lapangan 2020, dan Analisis Data Primer (2020)

Hasil pada penelitian ini jika dibandingkan dengan hasil penelitian Rizal *et al.* (2018) dan Siregar *et al.* (2017) yang menggunakan teknis analisis sosial ekonomi yang sama

namun berbeda pada beberapa variabel menunjukkan hasil yang berbeda. Pada penelitian Rizal *et al.* (2018) hasil menunjukkan kesejahteraan tinggi mencapai 100%. Sementara itu pada

penelitian Siregar *et al.* (2017) data cenderung heterogen dengan dicirikan didominasi oleh kesejahteraan sedang hingga menengah. Hal tersebut menunjukkan bahwa dengan teknis analisis yang sama dapat menghasilkan hasil yang berbeda bergantung pada objek penelitian. Masyarakat ex-bantaran rel yang memiliki karakteristik kondisi sosial ekonomi yang sangat heterogen membuat tingkat kesejahteraan lebih bervariasi.

4. Penutup

Terdapat variasi keruangan tingkat kesejahteraan di kawasan permukiman ex-bantaran rel kereta api di Kecamatan Majalaya. Kondisi sosial ekonomi kepala rumah tangga didominasi oleh usia produktif, tamatan sekolah dasar, rata-rata jumlah tanggungan 4,4 orang, warga asli Kecamatan Majalaya, memiliki pekerjaan yang mendukung sektor industri, akses pendidikan cukup mudah hingga sulit, keamanan tinggi, akses TIK sedang hingga rendah, transportasi cukup mudah hingga sulit, pelayanan kesehatan cukup baik, fasilitas kesehatan cukup lengkap, perumahan permanen, rata-rata pengeluaran perkapita perbulan Rp.1.422.298 (pengeluaran pangan 41% dan 59% pengeluaran non pangan), masyarakat miskin hingga miskin sekali dengan kedalaman kemiskinan sebesar 13,4%, dan kesejahteraan rumah tangga sedang. Kawasan permukiman ex-bantaran rel di Desa Sukamaju memiliki tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi dibandingkan desa lainnya. Sementara itu, Desa Padamulya memiliki persentase paling tinggi pada persentase kesejahteraan rendah.

Proses pengambilan kebijakan pada kawasan bercirikan kondisi kesejahteraan menengah hingga bawah harus dilaksanakan dengan terukur dan terencana dengan memberdayakan masyarakat untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berkeadilan. Kegagalan dalam penataan wilayah ini akan mengakibatkan semakin banyaknya permukiman kumuh baru pada wilayah yang luas. Penanganan yang tidak terencana dengan baik akan menimbulkan permasalahan baru yang semakin kompleks untuk diatasi.

Ucapan Terima Kasih

Artikel ini merupakan bagian dari tesis yang ditulis oleh Septi Sri Rahmawati di bawah bimbingan Dr. Sudrajat dan Prof. Sri Rum Giyarsih. Ucapan terimakasih disampaikan kepada Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Kementerian Keuangan Republik Indonesia (LPDP Kemenkeu RI) yang telah membiayai kegiatan penelitian dan kepada pemerintahan Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat yang telah memberikan izin melaksanakan penelitian, serta pihak-pihak yang membantu jalannya penelitian.

Daftar Pustaka

- Abubakar, A., Romice, O., & Salama, A. M. (2019). Slums and prosperity: a complex, dynamic pathway of intervention. *International Journal of Architectural Research*, 314-330. doi:0.1108/ARCH-02-2019-0041
- Amini, E. (2016). An Analysis on Physical-Environmental Quality of Informal Settlements and its Role in The Vitality of Citizens, Case

- Study: Informal Settlement of Qom City, Sheikhabad Neighborhood. *The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication - TOJDAC, Special Edition*, 2657-2662. doi:10.7456/1060NVSE/071
- Apriliyanti, Selvia. (2017). *Jurnal Sistem dan Manajemen Industri*, Vol 1 No 2 Desember 2017, 68-72.
- Average, C. (2019). *Low Income Housing Problems and Low Income Housing Solutions: Opportunities and Challenges in Bulawayo. Journal of Housing and the Built*. Vol. 34, pp. 927–938.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2018). *Survey Sosial Ekonomi Nasional 2018*. Jakarta.
- Bhakti, D. L. (2018). *Rel Kereta Api dan Hunian (Studi Penataan Hunian di Bantaran Rel Kereta Api Kelurahan Jebres)*. Surakarta: Program Studi Magister Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- BIG (Badan Informasi Geospasial). (2019). *Data SHP Kabupaten Bandung*. Diakses pada September 20, 2019, from <https://tanahair.indonesia.go.id/porta-web>
- BPS Kabupaten Bandung. (2022). *Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan, 2017-2021*. Diakses pada Desember 28, 2019, from <https://bandungkab.bps.go.id/indicator/12/362/1/jumlah-penduduk-menurut-kecamatan.html>
- BPS Kabupaten Bandung. (2019). *Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota Tahun 2018*. Diakses pada Desember 28, 2019, from <https://bulelengkab.go.id/assets/instantikab/126/bankdata/data-statistik-dan-informasi-kemiskinan-kabupaten-kota-tahun-2018-44.pdf>
- BPS Kabupaten Bandung. (2018). *Kecamatan Majalaya dalam Angka Tahun 2018*. Tersedia Online: <https://bandungkab.bps.go.id> diakses pada 15 December 2019.
- BPS Kabupaten Bandung. (2017). *Kecamatan Majalaya dalam Angka Tahun 2017*. Tersedia Online: <https://bandungkab.bps.go.id> diakses pada 15 December 2019.
- BPS Kabupaten Bandung. (2016). *Kecamatan Majalaya dalam Angka Tahun 2016*. Tersedia Online: <https://bandungkab.bps.go.id> diakses pada 15 December 2019.
- BPS Kabupaten Bandung. (2015). *Kecamatan Majalaya dalam Angka Tahun 2015*. Tersedia Online: <https://bandungkab.bps.go.id> diakses pada 15 December 2019.
- BPS Kabupaten Bandung. (2014). *Kecamatan Majalaya dalam Angka Tahun 2014*. Tersedia Online: <https://bandungkab.bps.go.id> diakses pada 15 December 2019.
- BPS Kabupaten Bandung. (2013). *Kecamatan Majalaya dalam Angka Tahun 2013*. Tersedia Online: <https://bandungkab.bps.go.id> diakses pada 15 December 2019.
- Chiodelli, F., & Moroni, S. (2014). *The complex nexus between informality and the law: Reconsidering unauthorised settlements in light of the concept of nomotopism*. *Geoforum*, 51, 161–168. doi:10.1016/j.geoforum.2013.11.000.
- Corburn, J., & Sverdlik, A. (2017). *Slum Upgrading and Health Equity*. *International Journal of Environmental Research and*

- Public Health, 14, 342, 1-12. doi:10.3390/ijerph14040342
- Das, S., Mitra, A., & Kumar, R. (2017). Do neighborhood facilities matter for slum housing? Evidence from Indian slum clusters. *Urban Studies*, Vol. 54(8), 1887–1904. doi:10.1177/0042098016634578
- Ezeh, A., Oyebode, O., Satterthwaite, D., Chen, Y.-F., Ndugwa, R., Satori, J., . . . Lilford, R. (2017). The history, geography, and sociology of slums and the health problems of people who live in slums. *Lancet*, 389, 547-559. doi:10.1016/S0140-6736(16)31650-6
- Google earth V 6.2.2.6613. 2019. Kecamatan Majalaya 107°45'-107°52'BT dan 6°59'-7°50'LS, Eye alt 617 m. DigitalGlobe 2019. <http://www.earth.google.com> [10 November 2019].
- Han, Y., Song, Y., Burnette, L. B., & Lammers, D. (2017). Spatiotemporal Analysis of the Formation of Informal Settlements in a Metropolitan Fringe; Seoul (1950-2015). *Sustainability*. Vol. 9, pp. 1-18
- Holmes, J., & Argent, N. (2016). Rural Transitions In The Nambucca Valley: Socio-Demographic Change In A Disadvantaged Rural Locale. *Rural Study*, Vol.48, pp. 129-142.
- Johar, M., Soewondo, P., Pujisubekti, R., Satrio, H. K., Adji, Ardi., & Wibisono, I. D. (2019). "Tahukah kamu?": Analisis Set Data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia (JEPI)*, Vol. 19, No. 2, pp. 191-208.
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). 2019. Daftar Permukiman Kumuh Kecamatan Majalaya. Diakses pada September 24, 2019, from <http://kotaku.pu.go.id/>.
- Mahabir, R., Crooks, A., Croitoru, A., & Agouris, P. (2016). The study of slums as social and physical constructs: challenges and emerging research opportunities. *Regional Studies, Regional Science*, 399-419. doi:10.1080/21681376.2016.1229130.
- Mardiana, R., Abidin, Z., & Soelaiman, A. (2014). Pendapatan dan Kesejahteraan Petani Karet Rakyat Di Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Wy Kanan. *JIIA*, Vol 2, No. 3, pp. 239-245.
- Mukeku, J. 2018. Urban Slum Morphology and Socio-economic Analogies: A Case Study of Kibera Slum, Nairobi, Kenya. *Urbanisation*, 3 (1), 17-32. doi:10.1177/2455747118790581.
- Nassar, D. M., & Elsayed, H. G. (2018). From Informal Settlements to Sustainable Communities. *Alexandria Engineering Journal*. Vol. 57, pp. 2367-2376.
- Patel, A., Crooks, A. T., & Koizumi, N. (2012). Slumulation: An agent-based modeling approach to slum formations. *Journal of Artificial Societies and Social Simulation*, 15, 2. Diakses pada from <http://jasss.soc.surrey.ac.uk/15/4/2.html>. doi:10.18564/jasss.2045.
- Patel, A., Koizumi, N., & Crooks, A. (2014). Measuring slum severity in Mumbai and Kolkata: A household-based approach. *Habitat International*, 41, 300-306. doi:<http://dx.doi.org/10.1016/j.habitatint.2013.09.002>
- Patino, J., & Duque, J. (2013). A Review of Regional Science Applications of Satellite Remote Sensing In Urban Settings. *Comput. Environ. Urban Syst*, Vol. 37, pp. 1–17.
- Rahmawati, S.S. (2020). Kajian Kualitas Permukiman dalam Perspektif Sosial Ekonomi Masyarakat.

- Tesis. Fakultas Geografi UGM. Tidak dipublikasikan.
- Rachmawati, R., Budiarti, C. V., Febrita, D., & Sulistyani, E. (2017). Inclusive Development through Providing Vertical Housing for Low Income Family in Yogyakarta Urban Areas. *Forum Geografi*, XXXI, 246-257. doi:10.23917 / forgeo.v31i2.5132.
- Rahmawati, S.S., Sudrajat, Giyarsih, S.R. 2020. Analysis of Settlements along Abandoned Railway Tracks in Majalaya Subdistrict, Bandung Regency, Indonesia. *Forum Geografi*, Vol 34 (1) July 2020: 51-65 DOI: 10.23917/forgeo.v34i1.10924.
- Rizal, A., Rosidah, & Fathira, G. 2018. Potret Tingkat Kesejahteraan Rumah Tangga Pembudidaya Ikan Di Ciganjur Jakarta Selatan. *Jurnal Ilmu-ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol. 20, No. 1, pp. 39-44.
- Rochmawati, N. F., Riyanto, W. H., & Nuraini, I. (2018). Hubungan Tingkat Pendidikan, Usia, dan Pengalaman Kerja Terhadap Pendapatan Pekerja Wanita Pada Industri Kerajinan Dompot Ida Collection Di Desa Pulo Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, Vol. II, pp. 399-408
- Satterthwaite, D. (2016). "Finding a place in the city; low-income housing sub-markets revisited", *Rethinking Precarious Neighbourhoods: Works, Paths and Interventions*, Paris, June, pp. 1-15.
- Siregar, N. R., Handaka, A. A., Rostika, R., & Nurhayati, A. (2017). Analisis Tingkat Kesejahteraan Nelayan Buruh Alat Tangkap Gill Net Di Desa Sungai Buntu Kecamatan Pedes Kabupaten Karawang. *Jurnal Perikanan dan Kelautan*, Vol. 8, No. 2, 112-117.
- Sunarti, Esariti, L., & Haulah, L. (2019). Spatial Assessment of Slum Area in Jepara City from Physical and Non-Physical Aspects Perspective. *IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science*, 1-10. doi:10.1088/1755-1315/313/1/012034
- Supriatna, A., & van der Molen, P. (2014). Land Readjustment for Upgrading Indonesian Kampung. *a Proposal South East Asia Research*, 379-397.
- Tanni, T. T., Hasan, M. J., Azad, A. K., & Bakali, B. (2014). State of the Environment in Slum Area: A Case Study on Khora Slum, Khulna. *J. Environ. Sci. & Natural Resources*, 7(1), 295 - 304. doi:https://doi.org/10.3329/jesnr.v7i1.22187
- Tian, L. (2015). Land Use Dynamics Driven by Rural Industrialization and Land Finance in The Peri-Urban Areas of China: "The examples of Jiangyin and Shunde". *Land Use Policy*, Vol. 45, pp. 117-127.
- Vasudevan, A. (2015). The makeshift city. *Towards a global geography of squatting. Progress in Human Geography*, 39, 338-359. doi:10.1177/0309132514531471.